

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk ke dalam negara yang yakin akan pentingnya faktor pendidikan bagi pembangunan Negara. Sumber daya manusia yang berdaya saing dan memiliki kualitas yang baik dapat tercipta karena adanya pendidikan. Sebagian besar para ahli menilai bahwa kunci kemajuan Negara terletak pada pendidikannya. Hal ini dapat dilihat dari *output* pendidikan tersebut.

Teknologi yang maju serta sumber daya alam yang melimpah ruah tidak akan berimbas jika sumber daya manusia yang dimiliki tidak berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi titik tumpu bagi negara yang memiliki keinginan untuk maju.

Seseorang yang mengenyam pendidikan relatif lama tentunya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi pula. Tingkat pendidikan yang tinggi inilah yang nantinya dapat merubah dan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan daya saing seseorang. Apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Negara Indonesia sudah mempuni maka secara tidak langsung bangsa Indonesia akan mampu bersaing dengan bangsa negara lain.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, hal ini tidak akan dapat terwujud apabila masyarakat

enggan ikut serta dalam praktiknya. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah harus bahu membahu untuk merealisasikan tugas atau kewajiban tersebut. Sekurang-kurangnya masyarakat mempunyai kesadaran mengenai pentingnya pendidikan hingga kemudian mampu berpartisipasi sebagai pengawas pendidikan dalam lingkungan sosial.

Sosialisasi menjadi kunci utama bagi terciptanya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Sosialisasi merupakan proses membimbing individu atau kelompok ke dalam dunia sosial atau masyarakat yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang lebih dewasa. (Nasution, 2004:126) Sosialisasi dapat dilakukan untuk mengurangi masyarakat yang masih belum mengerti serta mengetahui manfaat dari pendidikan. Sementara untuk menumbuhkan rasa empati masyarakat yang nantinya akan berujung pada keterlibatan sebagai pengontrol pendidikan diperlukan agen atau tokoh yang mempunyai kedudukan tinggi atau memiliki pengaruh dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Lebih jauh lagi pengawas pendidikan tersebut nantinya akan memiliki kerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan pengendalian sosial terhadap peserta didik di luar jam sekolah. Selain itu, dalam pemberian pemahaman pendidikan juga dapat dilakukan oleh agen-agen tersebut yang tentunya sudah memiliki kedekatan yang lebih dibanding dengan pemerintah dan nantinya informasi dan setiap permasalahan yang dihadapi di lingkungan atau tempat tersebut diberikan kepada pemerintah sehingga akan memudahkan pemerintah dalam pemecahan masalah dan pembuatan kebijakan.

Indonesia menerapkan kebijakan pendidikan wajib belajar dua belas tahun. Pemerintah mengharuskan warga negaranya mengenyam pendidikan minimal sampai tingkat SMA atau sekolah menengah atas. Peraturan yang keluar ini dibarengi dengan beberapa program beasiswa yang nantinya dapat menyokong proses pendidikan sampai ke jenjang tinggi dan nantinya akan meminimalisir tingkat putus sekolah, diantaranya yakni ada Dana Bantuan Operasional Siswa atau yang biasa dikenal Dana Bos, Bantuan Siswa Miskin atau BSM, Bidik Misi, dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP.

Kecerdasan suatu bangsa menjadi tugas pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa usaha pemerintah yang dimuat dalam kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan yang nilai relevan walaupun beberapa kali diubah dan diperbaiki. Misalnya kebijakan pergantian kurikulum yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan menyesuaikan dengan zaman.

Globalisasi merupakan perkembangan yang berpengaruh dalam mendukung munculnya berbagai perubahan dunia yang akan berlangsung. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai gejala atau fenomena yang dapat mengubah dunia menjadi kecil dari segi hubungan manusia. (Abdulah, 2007:81) Adanya globalisasi yang penyebar luasannya sulit dibatasi membuat anak bangsa krisis moral dan budi pekerti sehingga pemerintah mencoba menerapkan kebijakan pendidikan budaya dan karakter di lembaga pendidikan. Walaupun tujuannya baik yakni agar generasi penerus bangsa berkarakter dan bermoral namun dalam penerapannya seringkali memunculkan polemik atau masalah baru dimasyarakat. Masyarakat menjadi terpecah belah antara pihak yang pro dan

kontra. Dan ini yang terjadi pada beberapa kebijakan khususnya pada kebijakan yang muncul baru-baru ini yakni sistem zonasi.

Amerika merupakan salah satu negara maju yang menerapkan sistem zonasi. Pemutusan rantai kemiskinan menjadi tujuan dari diterapkannya sistem zonasi ini. Indonesia kemudian mencoba menerapkan di negaranya. Namun sistem zonasi yang diterapkan di Indonesia bertumpu pada pengharusan siswa memilih serta bersekolah di daerahnya atau memiliki jarak yang dekat dengan tempat tinggalnya. Pemerintah memanfaatkan sistem zonasi ini untuk pemerataan siswa maupun guru agar tidak terjadinya ketimpangan antar sekolah. Penghapusan label favorit juga menjadi salah satu fokus tujuan dari diterapkannya sistem zonasi ini.

Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah masih mengupayakan para siswa yang ingin masuk atau bersekolah ke sekolah yang memiliki radius jarak jauh dari tempat tinggalnya yakni dengan menggunakan jalur prestasi yang memiliki daya tampung sebesar lima persen disetiap sekolah. Syarat yang harus disertakan yakni melampirkan catatan prestasi baik akademik maupun non akademik dari tingkat nasional maupun internasional. Tidak terputus di sana, sekolah juga diberikan wewenang untuk menerima siswa yang pindah domisili sebanyak lima persen dengan syarat melampirkan surat bukti penugasan.

Pada tahun 2017 sistem zonasi sudah diterapkan di beberapa sekolah yang dianggap mampu oleh pemerintah sebagai bahan uji coba. Hingga kemudian pada tahun 2019 turun surat edaran tentang pengharusan setiap sekolah menggunakan sistem zonasi ini. Wilayah administrasi Kecamatan menjadi faktor penentu pembagian wilayah zonasi, yang pada praktiknya dibagi menjadi 4 zona.



Gambar 1.1

Penentuan Zona PPDB

Sumber:

<https://ppdbkotabandung.wordpress.com/2019/04/20/4-zonasi-pada-ppdb-kota-bandung-2019/>

Berdasarkan **Gambar 1.1** tentang penentuan zona PPDB. Pembagian zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kecamatan yang terbagi menjadi empat zona yakni zona A, zona B, Zona C dan Zona D. Zona A terdiri dari kecamatan sukasari, Cidadap, Coblong, Cibeunying Kaler, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeuying kidul, dan Sukajadi. Zona B terdiri atas Kecamatan Mandalajati, Antapani, Cinambo, Panyileukan, Cibiru, Gedebage, Rancasari, Ujungberug, dan Buahbatu. Zona C terdiri dari Kecamatan Kiara Condong, Batununggal, Lengkong, Regol, dan Bandung Kidul. Dan untuk Zona D terdiri dari

Kecamatan Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Babakan Ciparay Bojong Loa Kidul dan Kecamatan Astanaanyar.

Pemerintah menerapkan sistem zonasi ini karena dianggap mampu menjadi solusi atas beberapa permasalahan yang muncul dan memiliki beberapa kelebihan diantaranya yakni mampu menghemat biaya. Walaupun dalam implementasinya banyak menuai pertentangan karena dianggap merugikan beberapa pihak baik dari masyarakat maupun dari lembaga sekolah.

SMAN 1 Bojongsoang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang merasa dirugikan karena adanya penerapan sistem zonasi ini. Hal ini dikarenakan lokasi tempat sekolah ini berdiri tidak strategis yakni jauh dari pemukiman atau tempat tinggal warga. Dengan adanya permasalahan ini kemudian menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul “PROBLEMATIKA SISTEM ZONASI PESERTA DIDIK BARU” (studi kasus di SMAN 1 Bojongsoang).

1.2 Identifikasi Masalah

Pemerintah menilai sistem zonasi sebagai solusi bagi permasalahan yang muncul di masyarakat, khususnya pada pemerataan pendidikan. Namun, dalam praktik penerapannya malah mengundang masalah baru. Beberapa pihak sekolah contohnya merasa kebijakan tersebut merugikan pihaknya. Penyamaraan sistem kebijakan tanpa melihat daerah-daerah yang ditempati sekolah-sekolah menjadi salah satu penyebabnya.

Salah satu sekolah yang merasa tidak diuntungkan adalah SMAN 1 Bojongsoang. SMAN 1 Bojongsoang terletak di daerah yang jauh dari pemukiman atau tempat tinggal penduduk. Sekolah menengah atas ini berada di tengah-tengah sawah yang di dominasi oleh pabrik-pabrik.

Sistem zonasi yang memiliki aturan yakni memprioritaskan radius jarak sekolah dengan tempat tinggal secara langsung merugikan sekolah menengah atas ini. Selain itu, banyaknya sekolah menengah atas yang lebih dekat dengan tempat tinggal warga di daerah ini menjadi faktor pemicu kerugian lainnya bagi SMAN 1 Bojongsoang.

1.3 Rumusan Masalah

Dapat ditarik kesimpulan dari pemaparan permasalahan di atas yakni:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMAN 1 Bojongsoang Bandung?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dari pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMAN 1 Bojongsoang Bandung?
3. Bagaimana cara mengatasi problematika sistem zonasi PPDB di SMAN 1 bojongsoang Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMAN 1 Bojongsoang Bandung;

2. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul dari pelaksanaan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Bojongsoang Bandung;
3. Untuk mengetahui cara mengatasi mengatasi problematika sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Bojongsoang Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

kegunaan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini bisa digunakan untuk pengembangan ilmu sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan sosiologi pendidikan. Selain itu diharapkan juga dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya supaya bisa lebih mendalam.

2. Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana di Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai sarana untuk pengambilan kebijakan bagi SMA Negeri 1 Bojongsoang, tenaga pendidik dan kebudayaan. Selain itu juga dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui dan memahami aturan juga problematika yang terjadi karena penerapan kebijakan sistem zonasi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru yakni sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan hasil perubahan dari sistem rayonisasi. Dimana sistem rayonisasi ini menekankan pada pencapaian dalam bidang akademik sedangkan sistem zonasi menekankan pada jarak antara domisili siswa dengan sekolah. Lahinya sistem zonasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi menjalankan tugas dan kewajibannya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal ini tentunya diharapkan dapat memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan pendidikan.

Sistem zonasi memiliki beberapa tujuan yakni pemerataan, menghilangkan label sekolah favorit, mendekatkan lingkungan sekolah dengan rumah dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya penerapan sistem zonasi ke setiap sekolah menimbulkan persoalan. Masyarakat yang kompleks dan beragam menjadi salah satu penyebabnya. Sistem zonasi yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan pemerataan dalam relevansinya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini malah berbanding terbalik antara apa yang diharapkan dan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional Robert K. Merton. Dimana menurut Merton Suatu motivasi yang sadar dan diketahui merupakan sumbangan bagi syarat fungsional dimana hal ini mengacu pada fungsi manifest atau motif yang memang dimaksudkan sedangkan dalam prakteknya tidak jarang seringkali ditemui fungsi laten yakni suatu fungsi yang sebelumnya memang tidak dimaksudkan. (Maliki, 2010:121-123) Merton juga

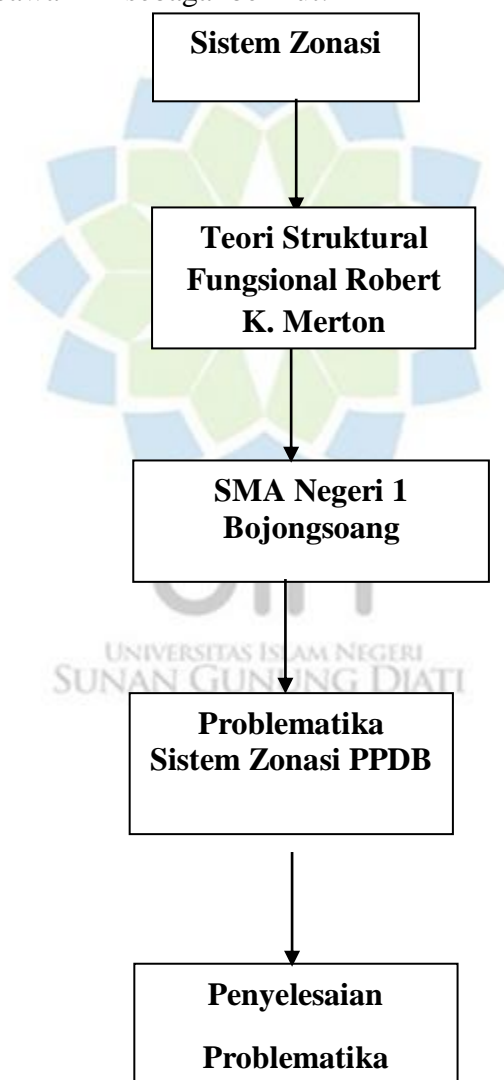
mengungkapkan bahwa setiap fungsi yang dimaksudkan atau fungsi manifest bisa saja berubah menjadi disfungsi atau bahkan nonfungsi apabila sudah diterapkan atau dilaksanakan dilapangan.

Permasalahan yang paling terlihat terdapat pada sekolah yang berada di daerah yang kurang strategis. Permasalahan yang terjadi justru malah menimbulkan ketidakseimbangan antara calon peserta didik dan kuota tampung sekolah. Banyak sekolah yang pada akhirnya malah kekurangan siswa dan sekolah yang lain kelebihan siswa atau peserta didik. SMAN 1 Bojongsoang menjadi salah satu sekolah yang merasakan permasalahan atau problematika ini.

Letak sekolah yang berada di tengah sawah dan jauh dari pemukiman membuat SMAN 1 Bojongsoang mengalami masalah mengenai jumlah calon peserta didik ketika menerapkan kebijakan sistem zonasi. Selain itu SMAN 1 Bojongsoang yang pada awalnya memang bukan termasuk ke dalam salah satu sekolah favorit juga bukan malah diuntungkan dengan adanya penerapan sistem zonasi ini malah menuai banyak kerugian-kerugian bagi pihak sekolah.

Fokus utama penelitian ini adalah pada sistem zonasi khususnya pada problematika atau permasalahan yang muncul akibat diterapkannya sistem zonasi ini di SMAN 1 Bojongsoang. Meliputi sekolah itu sendiri, peserta didik dan juga orang tua peserta didik yang ikut merasakan dampak dari penerapan sistem zonasi ini. Selain itu juga diharapkan dapat menyingkap cara yang digunakan oleh pihak sekolah dalam menangani masalah zonasi ini. Adapun permasalahan ini akan dikaji

dengan menggunakan teori struktural fungsional dari Robert K. Merton. Untuk mengungkap permasalahan ini peneliti merumuskannya dengan judul “PROBLEMATIKA SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU” (studi kasus di SMAN 1 Bojongsoang). Berdasarkan uraian di atas untuk lebih memahami kerangka pemikiran maka dapat dilihat pada kerangka pemikiran yang tergambar dibawah ini sebagai berikut:



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran peneliti



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG